

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1 Strategi

Strategi yang terdapat di dalam visi dan misi Walikota adalah “Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat pedesaan/kelurahan” guna mewujudkan tujuan dari visi dan misi melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

5.1.1.1 Strategi integrasi kebelakang

Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga kota dalam turut memikirkan kemajuan Wilayah Kecamatan Rakumpit.

5.1.1.2 Strategi Integrasi Ke depan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai ekses negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

5.1.1.3 Strategi Penguatan Ke dalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan

dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dari visi dan misi Walikota Palangka Raya adalah “Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”. Guna mendukungnya arah kebijakan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya maka SOPD Kecamatan Rakumpit merumuskan arah kebijakan antara lain :

- a. Penetapan aturan yang jelas dan penyusunan kebutuhan anggaran biaya maupun personil dalam kegiatan pelayanan;
- b. Penyederhanaan system operasional prosedur dan adminitrasi;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas kerja untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pengembangan budaya kerja yang professional dan bertanggung jawab.